SAMI: Jurnal Sosial Agama dan Teologi Indonesia
p-ISSN : xxxx-xxxx
e-ISSN : xxxx-xxxx
Volume 2, No. 1, Juni 2024, 63-88

==========

Tinjauan Teori Keadilan John Rawls terhadap Peran GPIB Paulus Jakarta dalam Menyikapi Kemiskinan di Jakarta Pusat

Moses Regan Marsasongko[1], Tony Tampake[2], Suwarto Adi[3]
[123]Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
*Email: [1]moses.regen@gmail.com, [2]tony.tampake@uksw.edu, [3]suwarto@uksw.edu

Riwayat artikel:
Recieved: 30-12-2024 Revised: 30-12-2024 Accepted: 31-12-2024

Abstract

Poverty is a social problem that still occurs and greatly affects all aspects of people's lives. Poverty causes social inequality, inequality, and injustice in society. The Special Capital Region (DKI) Jakarta as the capital city of Indonesia and the centre of all lines such as government and economy has a crucial poverty problem and is quite difficult to solve. Many efforts have been made by the government, various agencies, including the church to deal with the problem of poverty in DKI Jakarta. This research aims to analyse and understand how the role of the Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Paulus in addressing poverty in Central Jakarta is viewed based on John Rawls' theory of justice. John Rawls views that justice can be said to be justice when it sides with marginalised people. This research uses a descriptive qualitative method with participants from the Pelkes Commission (Service and Witness) of GPIB Paulus Jakarta. The results of this study show that the role of GPIB Paulus Jakarta in addressing poverty in Central Jakarta is carried out through Pelkes programmes, especially in the form of Diakonia action. In terms of John Rawls' theory, the Diakonia action carried out by GPIB Paulus Jakarta is fairness justice towards the problem of poverty in Central Jakarta.

Keywords: *Poverty, Justice, GPIB Paulus Jakarta, Role of the Church*

Abstrak

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang masih banyak terjadi dan sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan mengakibatkan ketimpangan sosial, ketidaksetaraan, hingga ketidakadilan dalam masyarakat. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dan menjadi pusat segala lini seperti pemerintahan dan perekonomian memiliki permasalahan kemiskinan yang krusial dan cukup sulit untuk dituntaskan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai instansi, termasuk gereja untuk menghadapi permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana peran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Paulus dalam menyikapi kemiskinan di Jakarta Pusat yang ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls. John Rawls memandang bahwa keadilan dapat dikatakan sebagai keadilan ketika ia berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap partisipan Komisi Pelkes (Pelayanan dan Kesaksian) GPIB Paulus Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran GPIB Paulus Jakarta dalam menyikapi kemiskinan di Jakarta

Pusat dilakukan melalui program-program Pelkes, terkhusus dalam bentuk aksi Diakonia. Ditinjau dari teori John Rawls aksi Diakonia yang dilakukan oleh GPIB Paulus Jakarta ialah keadilan *fairness* terhadap permasalahan kemiskinan di Jakarta Pusat.

Kata kunci: Kemiskinan, Keadilan, GPIB Paulus Jakarta, Peran Gereja, John Rawls

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di dalam sebuah negara khususnya di negara-negara yang masih berkembang. Hal itu dapat terjadi dikarenakan pertumbuhan pendapatan ekonomi yang rendah dari sebagian besar negara berkembang masih tidak dapat menguntungkan semua penduduk sehingga menciptakan ketimpangan sosial.[1] Dalam kondisi tersebut, ada banyak sekali dampak yang terjadi seperti halnya para masyarakat miskin yang menjadi khawatir terhadap masa depannya akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Menurut Djoenet Santoso kemiskinan dapat dilihat dari dua kajian yakni membicarakan mengenai ukuran melalui kriteria kemiskinan yang ditentukan dari kondisi seseorang atau keluarga seperti halnya kondisi pendapatan dan pengeluaran, misalnya kondisi pendidikan, kondisi rumah tinggal, kebutuhan dasar, dan kondisi permukiman sedangkan kajian yang kedua dapat ditentukan melalui perilaku miskin yang menyebabkan munculnya kemiskinan.[2] Berbeda halnya hasil uraian penelitian yang ditulis oleh Dr. Thee Kian Wie yang menegaskan bahwa sesungguhnya kemiskinan terjadi akibat dari upaya pertumbuhan ekonomi negara yang menciptakan ketimpangan pendapatan

[1] Bob Goudzwaard and Harry de Lange, *Di Balik Kemiskinan & Kemakmuran*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 20.
[2] Santoso Djonet, *Penduduk Miskin Transcient Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3.

sehingga menciptakan kemiskinan.[3] Maksud dari pernyataan itu beliau tegaskan ialah dampak dari beberapa contoh negara yang memfokuskan diri mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi lupa terhadap keadaan masyarakat di dalamnya yang mengalami ketimpangan pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui hal tersebut, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kemiskinan dapat dikatakan sebagai sebuah masalah yang sangat serius sehingga hal itu harus diselesaikan secara tuntas dengan berbagai upaya.

Berbicara mengenai kemiskinan, Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang masih dikaterogikan sebagai negara miskin. Hasil pengamatan dari *Wor*ld *Population Review* pada tahun 2020, menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-73 sebagai negara termiskin dunia.[4] Hal itu juga dinyatakan oleh Bank Dunia atau *World Bank* melalui hasil laporan yang berjudul '*East Asia and The Pacific Ecomic*' yang dirilis pada tahun 2022 bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diperkirakan memiliki 13 juta penduduk yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan.[5] Hal itu juga dinyatakan oleh Badan Pusat Stastistik (BPS) melalui hasil laporan dimiliki, akan tetapi hasil yang dilampirkan malah berbeda dari perkiraan *World Bank* dikarenakan pada tahun 2022 hasil

[3] Wie Kian Thee, *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), 20.
[4] CNN Indonesia, "RI Masuk 100 Negara Paling Miskin Di Dunia," cnnindonesia.com, 2022, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia.,%243.870 per kapita pada 2020.
[5] Natasha Khairunnisa Amani, "Indonesia Masuk Daftar 100 Negara Paling Miskin Di Dunia," Liputan6, 2022, https://www.liputan6.com/bisnis/read/5084740/indonesia-masuk-daftar-100-negara-paling-miskin-di-dunia.

laporan angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi yakni sekitar 25 juta orang miskin baik itu dalam ruang lingkup perkotaan maupun pedesaan.[6]

Hal itu juga termasuk DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia. Pada saat ini, DKI Jakarta merupakan pusat dari segala lini seperti halnya pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Akan tetapi, sekalipun DKI Jakarta merupakan ibukota negara saat ini, masalah kemiskinan yang terjadi disana cukup krusial dan susah untuk dituntaskan. Pada saat ini, melalui data yang telah dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa angka kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta telah mengalami penurunan sekitar 0,17 persen sejak bulan September 2022 yang lalu. Akan tetapi, menurut BPS menyatakan bahwa sekalipun terjadi angka penurunan masih ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.[7] Selain daripada itu, DKI Jakarta saat ini juga sedang mengalami dilema karena kemiskinan ekstrem masih terjadi di DKI Jakarta dan terus mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti halnya banyaknya kepala rumah tangga yang hanya lulusan SMA dengan rata-rata usai yang menginjak 45 tahun dan hal lainnya ialah banyak kondisi permukiman rumah yang tidak layak dihuni dengan luas tanah hanya 8 meter persegi.[8] Hal itu menjadi sangat miris, melihat bahwa DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan sering menjadi sorotan utama di provinsi-provinsi lain. Melalui data tersebut, dapat terlihat bahwa

[6] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," bps.go.id, 2023, https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html.
[7] Tria Sutrisna and Ihsanuddin, "BPS DKI: Penduduk Miskin Jakarta 477.830 Orang," Kompas.com, 2023, https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/17/18105101/bps-dki-penduduk-miskin-jakarta-477830-orang.
[8] Tiara Aliya Azzahra, "Jumlah Warga Miskin Ekstrem Di DKI Melonjak: 95.668 Jiwa Per Maret 2022," detik.com, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6541817/jumlah-warga-miskin-ekstrem-di-dki-melonjak-95668-jiwa-per-maret-2022.

sesungguhnya sekalipun DKI Jakarta merupakan ibukota negara republik Indonesia, kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut masih menjadi suatu masalah serius yang belum kunjung usai. Apalagi jika melihat bahwa sesungguhnya angka kemiskinan yang terjadi justru mengalami situasi yang krusial dikarenakan kemiskinan ekstrem yang meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagaimana kemiskinan yang terjadi di ibukota negara yaitu DKI Jakarta, maka Jakarta Pusat sebagai salah satu wilayah DKI Jakarta juga termasuk ke dalam bagiannya. Melihat dari hasil data kemiskinan yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik, sejak dari tahun 2020-2022 wilayah Jakarta Pusat masuk ke dalam peringkat presentase tingkat kemiskinan tertinggi setelah wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara yakni 4,90 persen di tahun 2022. Padahal tingkat jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Stastistik pada tahun 2022 menyatakan bahwa wilayah Jakarta Pusat memiliki Jumlah penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta Timur dan Jakarta Barat.[9] Melihat dari hal tersebut, tentu saja fenomena kemiskinan yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat sudah pasti disebabkan oleh adanya berbagai macam situasi yang kurang kondusif sehingga mengalami kondisi yang cukup parah. Dalam konteks kemiskinan yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat, hal yang paling menarik perhatian dalam melihat fenomena kemiskinan ialah kondisi permukiman warga yang kumuh. Dalam hal tersebut, wilayah Jakarta Pusat masih memiliki beberapa titik pemukiman warga yang tergolong kumuh bahkan beberapa titik pemukiman warga kumuh itu

[9] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023."

juga berdekatan dengan wilayah istana negara.[10] Berdasarkan data yang diperoleh oleh Pemprov DKI Jakarta, ada banyak wilayah pemukiman warga kumuh yang masih dalam tahap proses pembenahan sedang sehingga dimasukkan ke dalam katerogi "sedang" untuk memberikan tanda terhadap beberapa wilayah tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pemukiman warga yang kumuh merupakan bagian dari fenomena kemiskinan, hal itu dikarenakan dampak dari pemukiman yang kumuh menyebabkan berbagai kondisi kemiskinan terjadi seperti halnya kondisi kesehatan serta kondisi tempat tinggal menjadi saling terikat satu sama lain di dalamnya.[11] Dengan demikian, hal itu sudah sangat menjelaskan bahwa sesungguhnya kemiskinan yang ada di Jakarta Pusat masih perlu untuk diperhatikan secara signifikan. Melihat dari fenomena tersebut, pada dasarnya pemerintah baik dalam ruang lingkup nasional maupun daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas kemiskinan. Menurut Ulfatul Umami, sejak masalah krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan kekacauan di Indonesia, ada berbagai strategi untuk memberantas kemiskinan, seperti halnya peluncuran program beras miskin atau biasa dikenal dengan isitilah "Raskin" yang diakibatkan pada masa krisis untuk membantu masyarakat di kelas menengah ke bawah.[12] Bukan hanya terhenti disaat itu saja, pada saat ini juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan masih

[10] Winda Nelfira, "Masih Ada Pemukiman Kumuh Dekat Istana, Ketua DPRD DKI Jakarta: Jaraknya 1 Km," Liputan6, 2023, https://www.liputan6.com/news/read/5237096/masih-ada-pemukiman-kumuh-dekat-istana-ketua-dprd-dki-jakarta-jaraknya-1-km.
[11] Djonet, *Penduduk Miskin Transcient Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*.
[12] Ulfatul Umami, "Cara Pandang Dan Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan," *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 9, no. 4 (2013): 343–54, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6673.

menjadi salah satu tugas utama. Seperti halnya yang terjadi di DKI Jakarta, menurut Rivaldo Arnold Belekubun ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam memberantas kemiskinan. Seperti halnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemprov DKI Jakarta berupa Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah, Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi air bersih, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.[13] Dalam penyelesaian kemiskinan, tentu saja hal itu bukan hanya pemerintah nasional serta daerah yang harus menjadi satu-satunya pihak utama yang berperan. Dalam hal tersebut, gereja sebagai salah satu bagian di dalamnya tentu juga harus mengambil peran untuk membantu sehingga tidak hanya melihat fenomena tersebut dengan berpangku tangan saja.

Seperti halnya tugas dan panggilan yang dimiliki oleh gereja yaitu koinonia (persekutuan), marturia (kesaksian), dan diakonia (pelayanan). Pada ketiga tugas panggilan gereja tersebut, sudah sangat jelas bahwa gereja bukan hanya melalukan tugas panggilannya dalam mengikuti salah satu dari tugas panggilan itu melainkan mencakup ketiga bagian tersebut. Berkaitan dengan hubungan antara gereja dan kemiskinan yang hadir di tengah kehidupan kota, seperti halnya yang dikatakan oleh Guiterrez yang menyatakan bahwa sesungguhnya gereja sebagai sebuah komunitas dipanggil untuk memproklamasikan karya pembebasan Kristus di tengah-tengah sejarah kemiskinan dan dari belenggu penindasan,[14] Maksud dari pernyataan tersebut, tentu saja ingin menegaskan bahwa sesungguhnya gereja

[13] Rivaldo Arnold Belekubun, "Kemiskinan Ekstrem Di Jakarta Naik Penanganan Mesti Efektif Dan Tepat Sasaran," Kompas.id, 2023, https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/04/upaya-mengikis-kemiskinan-ekstrem-di-jakarta?status=sukses_login&status_login=login.
[14] Chen Martin, *Teologi Gustavo Gutierrez* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 21.

memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pelopor dalam perubahan sosial untuk memberikan pembebasan bagi mereka yang masih terkungkung dalam dinamika kemiskinan. Namun, kenyataannya sering kali berbeda dengan sebuah misi yang perlu dijalankan oleh gereja. Oleh karena itu, gereja seharusnya sadar terhadap posisi yang ia miliki sehingga dalam menjalani kehidupannya ia tidak hanya berfokus kepada para jemaatnya melainkan juga dapat berperan aktif untuk membantu negara dalam menuntaskan kemiskinan sehingga dapat menegakkan keadilan di dalamnya.

Sebagaimana kemiskinan di Indonesia khususnya yang terjadi di DKI Jakarta, hal itu seharusnya menjadi salah satu bagian yang perlu diselesaikan oleh gereja secara khusus GPIB Paulus Jakarta yang berada tepat di Jakarta Pusat. Sebagai sebuah gereja yang hidup di tengah ibukota, GPIB Paulus Jakarta tidak dapat menutup mata terhadap situasi kemiskinan yang terjadi disekitarnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa gereja perlu berperan aktif dalam menghadapi kemiskinan serta mengayomi masyarakat yang miskin agar kehidupannya menjadi lebih baik. Gereja harus peduli terhadap kemiskinan. Dalam hal tersebut, GPIB Paulus Jakarta saat ini memang melakukan beberapa cara untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi gereja yakni komisi Pelkes (Pelayanan kesaksian) dan diakonia. Seperti halnya memberikan sembako yang menjadi kebutuhan dasar. Selain daripada itu, GPIB Paulus juga melakukan bedah rumah terhadap jemaat yang dianggap memiliki rumah tidak layak untuk dihuni. Hal lain yang dilakukan oleh GPIB Paulus ialah kondisi kesehatan yang dibentuk sebagai pos pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di

daerah sekitaran GPIB Paulus untuk mengecek kesehatan para warga jemaat maupun diluar warga jemaat. Dalam hal tersebut, tentu saja upaya yang dilakukan oleh gereja memang sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi hal itu tidak dapat dikatakan secara keseluruhan telah menuntaskan kemiskinan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak orang yang berada di dalam kondisi miskin baik itu dalam ruang lingkup jemaat maupun orang diluar jemaat yang berada di sekitaran wilayahnya.

Meyvie Wairata pada tahun 2017 dalam tesisnya yang mengkaji suatu penelitian berjudul "Diakonia Transformatif dalam pengentasan Kemiskinan Upaya Mentransformasi Pelayanan Gereja terhadap orang miskin dalam konteks GKI Martin Luther Di Tanah Papua" dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang membahas mengenai pelayanan gereja terhadap kemiskinan di Papua dalam konsteks GKI Martin Luther khususnya di daerah Sentani. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa partisipan melalui wawancara mendalam terhadap Pendeta Jemaat, pengurus gereja, serta anggota jemaat dari gereja. Dalam penelitiannya, beliau melihat bahwa sesungguhnya pelayanan gereja yang dilakukan masih dianggap mengecewakan, hal itu dikarenakan bentuk upaya diakonia yang masih sangat terbatas hanya sekedar "memberi" bukan memberdayakan orang-orang miskin di sekitarnya dengan bersifat karikatif, refomartif, dan transformatif.[15] Akibatnya kemiskinan dalam konteks GKI Martin Luther masih banyak terjadi. Maka dari itu, menurutnya gereja perlu merenungkan

[15] Meyvie Wairata, "Diakonia Transformatif Dalam Pengentasan Kemiskinan: Upaya Mentransformasi Pelayanan Gereja Terhadap Orang Miskin Dalam Konteks GKI Martin Luther Di Tanah Papua" (Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW, 2017).

kembali arti dari diakonia yang sesungguhnya, sehingga masalah kemiskinan di GKI Martin Luther Papua dapat terselesaikan.

Penelitian yang juga berkaitan dengan peran gereja dalam menyikapi kemiskinan ialah Sharon Michelle O. Pattiasina pada tahun 2021 yang berjudul " Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan" yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memfokuskan dirinya dalam upaya penanganan pemberdayaan jemaat yang ada di Maluku Tengah khususnya daerah Seram utara tepatnya di dusun Siahari sebagai wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di daerah Maluku Tengah, sehingga hal itu menjadi keresahan tersendiri yang dimiliki oleh peneliti.[16] Keresahan itu dikarenakan transportasi yang kurang memadai sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar para siswa sehingga bukan hanya berpengaruh kepada pendidikan melainkan juga mencakup perekonomian serta kesehatan serta perekonomian. Padahal wilayah dusun tersebut, memiliki banyak sekali peluang untuk menstabilkan perekononomian warga di sekitar wilayah tersebut. Maka dari itu, ia menyatakan bahwa gereja seharusnya dapat berperan aktif dalam upaya pemberdayaan manusia yang di wilayah tersebut, bukan hanya memberikan bantuan dengan pemberian belangsungkawa saja. Dalam hal tersebut, tugas dan panggilan gereja tidak hanya terpusat kepada para jemaat yang ada di dalamnya

[16] Sharon Michelle O Pattiasina, "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 1 (2021): 125–40, https://doi.org/https://doi.org/10.34307/b.v4i1.238.

melainkan juga perlu menjadi pendamping negara dalam membantu menuntaskan masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah Dusun Siahari.

Berbeda halnya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji variabel diakonia maupun pemberdayaan manusia dalam peran gereja terhadap kemiskinan, penelitian ini akan meneliti peran gereja dalam menyikapi kemiskinan yang ditinjau melalui teori keadilan John Rawls. Hal ini dilakukan karena penulis melihat bahwa ada keterkaitan yang erat antara teori keadilan John Rawls unttuk meninjau kembali peran gereja dalam menyikapi kemiskinan. Rawls menyatakan bahwa semua susunan masyarakat didasari oleh suatu institusi sosial karena institusi memiliki pengaruh yang mendasar terhadap kehidupan seorang individu.[17] Dengan adanya institusi sosial, masyarakat yang ada terkhususnya masyarakat yang termaginalisasi (dalam hal ini masyarakat miskin) akibat dari kondisi tertentu harus dirangkul oleh institusi-institusi sosial di dalamnya termasuk gereja.

Menurut Oinike Natalita Harefa, teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa keadilan itu dapat hadir jika setiap pihak memiliki posisi yang setara.[18] Rawls juga menyatakan bahwa hubungan sosial dapat berjalan baik jika dapat menjalani dua prinsip mendasar yakni prinsip kebebasan yang sama *(principle of equal liberty)* dan prinsip ketidaksamaan *(the principle of difference)*.[19] Dalam prinsip yang pertama, Rawls ingin menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan yang sama yakni kebebasan yang mendasar seperti halnya kebebasan dalam

[17] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589.
[18] Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr," *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.
[19] A Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 175–92.

berfikir, kebebasan politik, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, dan kebebasan memiliki kekayaan. Berbeda halnya dengan prinsip yang kedua, maksud dari prinsip tersebut ialah walaupun setiap individu memiliki ketidaksamaan baik dalam bidang ekonomi dan sosial, akan tetapi mereka pasti harus tetap setara.

Dalam hal tersebut, gereja sebagai salah satu bagian dalam institusi sosial harus secara sadar memahami perannya, sehingga disamping menjalankan tugas dan panggilannya terhadap jemaat yang ada di dalamnya, gereja terlebih khususnya GPIB Paulus Jakarta juga perlu keluar dalam menghadapi tantangan yang ada di sekitarnya termasuk masalah kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta. Dengan demikian, negara dan gereja dapat menjadi partner dalam mengambil peran khusus untuk menangani kemiskinan yang terjadi di dalamnya, sehingga setiap masyarakat mengalami pembebasan yang terjadi di dalam dirinya. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana peran GPIB Paulus Jakarta dalam menyikapi kemiskinan yang ada di DKI Jakarta khususnya daerah Jakarta Pusat melalui tinjauan teori keadilan John Rawls yang menjadi landasan teori peneliti sebagai kacamata untuk melihat fenomena tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif yang digunakan ialah untuk mendapatkan gambaran dan menggali informasi yang lebih luas serta mendalam mengenai peran GPIB Paulus Jakarta dalam menyikapi kemiskinan di Jakarta Pusat.[20] Dalam metode

[20] Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 14.

penelitan kualitatif tersebut, peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan analisis data yang hanya dapat diperoleh melalui kata-kata, gambar, dan perilaku.[21] Melalui pendekatan tersebut, hasil penelitian akan diuraikan secara naratif melalui situasi serta kondisi yang terjadi di tempat penelitian.

ada tahap ini, informan atau partisipan yang dilakukan pada penelitian ini ditentukan dengan prosedur *purposif.* Prosedur *purposif* ialah salah satu strategi dalam menentukan partisipan dengan cara menentukan kelompok yang akan menjadi partisipan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan penelitian tertentu.[22] lasan dari peneliti memilih menggunakan prosedur *purposif* dalam menentukan partisipan dikarenakan dalam proses penelitian tidak terjadi keterbatasan pada satu atau sekelompok informan sehingga menghindari terjadinya kesulitan dalam mengumpulkan informan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Karakteristik partisipan yang akan digunakan pada penelitian ini akan dipaparkan secara rinci antara lain, individu yang bersedia menjadi partisipan penelitian dengan mengisi *informed consent*. Individu yang adalah Pendeta dan Majelis dari GPIB Paulus. Individu yang adalah Ketua, Wakil, Sekretaris, serta beberapa anggota komisi Pelkes (Pelayanan Kesaksian dan Diakonia) dari GPIB Paulus. Individu yang saat ini sudah tinggal di Kawasan Jakarta Pusat.

Selain daripada itu, teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah sebuah metode wawancara mendalam atau *in depth-interview* serta obersevasi tidak berstruktur. Wawancara mendalam merupakan sebuah proses

[21] S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
[22] Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 107.

untuk menggali informasi agar peneliti mendapat informasi secara mendalam suatu proses penggalian informasi untuk mendapatkan informasi secara mendalam, terbuka dan diarahkan pada tujuan penelitian. Teknik pengambilan data ini sendiri bersifat eksploratif, hal itu dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi secara rinci dari partisipan serta menyeluruh.[23]

Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terkait informasi yang ingin diperoleh. Wawancara mendalam ini akan menggunakan pedoman semi-terstuktur dalam wawancara untuk tetap memungkinkan timbulnya pertanyaan yang dianggap perlu selama proses wawancara mendalam meskipun tidak tertulis dalam pedoman baku wawancara. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi yang bersifat tidak berstruktur selama wawancara berlangsung, hal ini dilakukan untuk memungkinkan agar penelitian bersifat *fleksibel* sehingga berbagai data yang tidak terduga juga dapat dikumpulkan.[24]

Dalam wawancara yang akan dilaksanakan, peneliti akan menggunakan alat bantu untuk melakukan pengambilan data. Ada 2 alat bantu yang menjadi bagian dalam penelitian yakni pedoman wawancara yang di dalamnya berisi mengenai daftar pertanyaan atau catatan agar dapat mencari informasi yang ingin diperoleh serta berbagai aspek yang dibahas dalam wawancara. Yang kedua ialah sebuah *handphone* atau alat perekam yang digunakan untuk menyimpan data-data yang telah dikumpulkan serta membantu pengolahan informasi dari partisipan

[23] Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 24.
[24] Sarosa, 23.

penelitian. Yang terakhir adalah alat tulis dan kertas untuk mencatat data-data dan hal-hal penting yang didapatkan dalam wawancara.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aksi Diakonia GPIB Paulus Jakarta Sebagai Keadilan *Fairness* Terhadap Kemiskinan di Jakarta Pusat

Jemaat GPIB Paulus Jakarta memandang kemiskinan sebagai seseorang yang mengalami ketelantaran, pendapatan yang tidak memadai, dan kehidupan yang tidak layak. Namun, definisi mengenai kemiskinan sendiri juga tergantung pada cara berpikir individu itu sendiri. Menurut Gunawan Sumodiningrat, kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga penegertian yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan kultural, dan kemiskinan relatif.[25] Yang *pertama* ialah kemiskinan absolut, pendapatan yang dimiliki oleh seseorang sudah jelas tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam hal tersebut, kemiskinan absolut dapat dikatakan sebagai situasi kemiskinan yang mutlak akibat dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia dikarenakan rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Yang *kedua* ialah kemiskinan kultural, suatu kemiskinan yang tercipta melalui budaya seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha bekerja. Yang *ketiga* ialah kemiskinan relatif, masalah kemiskinan ini terjadi akibat dari kebijakan pembangunan yang belum seimbang sehingga mempengaruhi pendapatan seseorang yang menjadi timpang. Sejalan dengan pandangan tersebut, GPIB Paulus

[25] Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan," *Jurnal Keislaman: Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2015): 3.

Jakarta secara sadar memahami bahwa sesengguhnya kemiskinan terjadi dikarenakan situasi individu yang memiliki pendapatan kecil akibat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, situasi ini terkadang membuat para Jemaat GPIB Paulus curiga sehingga memandang bahwa kemiskinan terjadi akibat cara berpikir. Alasan mengapa pernyataan tersebut dilontarkan ialah dikarenakan kemiskinan kultural yang membuat orang-orang bergantung terhadap bantuan yang diberikan. Dengan demikian, dapat terlihat jelas bahwa sesungguhnya alasan dari pendefinisian yang dimiliki oleh jemaat GPIB Paulus memiliki sifat yang relatif dikarenakan situasi yang terjadi di sekitarnya.

Fenomena pengemis dapat menjadi contoh nyata untuk melihat pandangan jemaat GPIB Paulus Jakarta dalam memahami definisi kemiskinan yang mengarah kepada cara berpikir. Menurut Febrina Damayanti, masalah kemiskinan sudah ada sejak dahulu kala, pada masa lalu pandangan masyarakat terhadap kemiskinan dikarenakan minimnya materi yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi pada saat ini salah satu aspek yang membuat kemiskinan menjadi banyak ialah dikarenakan semakin banyak orang yang menggangtungkan hidup mereka kepada orang lain salah satunya menjadi seorang pengemis.[26] Melalui hal tersebut, pandangan definisi serta penyebab kemiskinan yang dimiliki oleh jemaat GPIB Paulus Jakarta sangat menggarisbawahi cara berpikir seseorang. Sekalipun, jemaat GPIB Paulus Jakarta menyadari bahwa sesungguhnya penyebab kemiskinan terjadi akibat dari pendapatan yang minim, penggaguran yang membeludak akibat persaingan era

[26] Febrina Damayanti, Thriwaty Arsal, and Adang Syamsudin Sulaha, "Kondisi Sosial Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)," 2017, 144.

globalisasi, dan permukinan rumah yang tidak layak.[27] Akan tetapi, situasi di Jakarta khususnya daerah Jakarta Pusat masih memiliki fenomena pengemis tersebut, sehingga tidak heran jika pandangan jemaat GPIB Paulus Jakarta terhadap penyebab kemiskinan juga berkaitan dengan cara berpikir seseorang. Akan tetapi, sekalipun GPIB Paulus Jakarta memiliki pandangan terhadap definisi dan penyebab kemiskinan yang mengarah kepada cara berpikir. Hal tersebut tidak membuat GPIB Paulus Jakarta melepaskan tanggung jawabnya untuk menolong orang-orang yang terasingkan.

Aksi diakonia yang dimiliki oleh GPIB Paulus Jakarta dalam bentuk program-program yang terlaksana melalui komisi Pelkes (Pelayanan Kesasksian) menunjukkan bahwa sesungguhnya jemaat GPIB Paulus sangat peduli terhadap orang-orang yang terasingkan dan termarginalkan. Hal ini telah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama warga jemaat GPIB Paulus dalam memenuhi panggilan melalui visi dan misi GPIB sebagai umat Allah yang menghadirkan damai sejahtera kepada setiap makhluk. Dalam hal tersebut, aksi diakonia GPIB Paulus Jakarta ialah untuk menaungi setiap orang yang ada di sekitarnya agar dapat merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Pada dasarnya, arti diakonia sendiri merujuk kepada makna melayani, dalam bahasa Ibrani disebut *syeret* yang berarti melayani sedangkan pada terjemahan Yunani disebut *diakonia (*pelayanan*), diakonein* (melayani), dan *diakonos* (pelayan).[28] Menurut John Stott dalam Krido Siswanto, tujuan diakonia dapat digambarkan secara jelas dalam kehadiran Yesus yang datang ke dunia untuk orang-orang yang berada dalam situasi menderita, lemah, dan

[27] Hasil wawancara penelitian dengan Ketua Komisi Pelayanan Kesaksian (Pelkes) Ibu Magda Sumarandak Matindas, Media *Handphone*, 12 Desember 2023.
[28] Jonathan Freshly Sembiring, "Gereja Dan Diakonia," *Pondok Daud* 6, no. 1 (2020): 1.

tersingkirkan oleh lingkungan sosial di sekitarnya.[29] Oleh sebab itu, jemaat GPIB Paulus Jakarta mengambil perannya sebagai rumah Tuhan dan institusi sosial untuk membebaskan setiap orang dari belenggu penderitaan. Hal tersebut juga telah diajarkan oleh Yesus lewat pernyataan-Nya mengenai hukum kasih yang dituliskan dalam Injil Matius 22 : 39 yang berbunyi "Dan hukum yang kedua, yang sama denfan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," Melalui hal tersebut, GPIB Paulus menyadari pentingnya diakonia untuk melayani sesama manusia karena mereka juga setara.

Saat ini, GPIB Paulus Jakarta sedang masuk ke dalam fase peralihan dari diakonia karikatif menuju pada tahap puncak yaitu diakonia transformatif.[30] Hal ini dikarenakan bentuk evaluasi yang telah dimiliki oleh jemaat GPIB Paulus Jakarta yang melihat bahwa hasil dari aksi diakonia yang dilakukan oleh gereja masih perlu dikembangkan ke arah yang lebih maju.[31] Alasan pernyataan ini muncul, dikarenakan pandangan dari jemaat sendiri yang masih melihat bahwa bentuk program-program yang dijalankan kurang efektif, sehingga tidak heran jika tanggapan terhadap kemiskinan ke dalam cara berpikir yang bersifat subjektif. Melalui hal tersebut, GPIB Paulus menyadari bahwa sesungguhnya diakonia yang diberikan masih bersifat diakonia karikatif. Berbicara mengenai diakonia karikatif, pada dasarnya konsep diakonia mengalami perkembangan dari mulai diakonia karikatif, reformatif, dan transformatif. Menurut Jimmy Oentoro, penggambaran

[29] Krido Siswanto, "Tinjauan Teoritis Dan Teologis Terhadap Diakonia Transformatif," *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2014): 99.
[30] Hasil wawancara dengan Bapak Pdt.Jonny Alexander Lontoh, media *Handphone*, 15 Desember 2023
[31] Hasil wawancara dengan Bapak Pdt.Jonny Alexander Lontoh, media *Handphone*, 15 Desember 2023

dari ketiga konsep digambarkan melalui sebuah analogi yang sederhana.[32] Dalam diakonia karikatif seseorang yang lapar diberikan nasi, tetapi tidak mengajarkannya untuk menghasilkan sebuah nasi. Pada diakonia reformatif, seseorang diberikan alat pancing untuk memancing ikan tetapi tidak mengajarkannya cara memancing. Sedangkan, diakonia transformatif ialah seseorang diberikan alat memancing serta diajarkan cara memancing, lalu diinformasikan mengenai tanda-tanda memancing agar seseorang tersebut paham sehingga dapat memancing sendiri.[33]

Singkatnya, diakonia karikatif dan reformatif dilihat melalui seseorang yang hanya diberikan seseuatu yang sifatnya singkat sehingga ia tidak dapat mandiri, sedangkan dalam diakonia transformatif seseorang diberikan sesuatu serta diajarkan agar dia dapat menjalankannya sendiri. Dalam hal tersebut, GPIB Paulus Jakarta menyadari bahwa sesungguhnya kesetaraan yang dimiliki seseorang dapat diperoleh jika ia berdiri pada dirinya sendiri. Maka dari itu, diakonia transformatif menjadi kunci utama untuk mencapai kesetaraan yang dimiliki. Sekalipun, pada saat ini ada banyak tantangan yang terjadi dalam masa peralihan terhadap konsep diakonia yang menuju transformatif. Hal ini tidak menjadi suatu bentuk putus asa, melainkan semangat baru dalam iman yang dimiliki untuk terus diperharui melalui kasih Allah sehingga dapat selalu menjadi contoh nyata terhadap gereja sekitar, sehingga juga ikut dalam mengambil peran dalam diakonia traformatif. Dengan demikian, ketimpangan sosial yang terjadi dapat teratasi secara perlahan dikarenakan pendirian yang telah dimiliki oleh setiap orang.

[32] Jimmy Oentoro, *Gereja Impian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78.
[33] Oentoro, 78.

B. GPIB Paulus Jakarta Sebagai *Original Position* Terhadap Kemiskinan di Jakarta di Jakarta Pusat

Selaras dengan pandangan Rawls mengenai keadilan yang dilihat melalui sikap GPIB Paulus Jakarta dalam menyikapi kemiskinan. Peran yang dilakukan oleh GPIB Paulus sudah sangat tepat, hal itu dikarenakan pandangan serta sikap yang diambil melalui program-program serta pemahaman akan kasih yang melihat kesetaraan di dalamnya. Dalam hal tersebut, GPIB Paulus menyadari bahwa sesungguhnya keadilan dapat dikatakan adil jika ia berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan. Melalui visi dan misi serta berbagai program yang telah dijalankan, GPIB Paulus Jakarta memahami secara dalam arti dari keadilan itu sendir. Hal tersebut dapat terlihat secara jelas melalui bentuk kesadarannya bahwa ada ketimpangan sosial yang terjadi di sekitarnya, sehingga hal itu harus diatasi segera, agar ketimpangan sosial dapat dihilangkan. Sikap yang ditunjukkan oleh GPIB Paulus sendiri ialah bentuk *marximin rule* yang merupakan sebuah upaya dalam mengatasi ketimpangan. Dalam hal tersebut, secara implisit GPIB Paulus Jakarta menyadari bahwa struktur sosial hadir untuk saling membantu satu sama lain. Maka dari itu, GPIB Paulus Jakarta hadir di tengah bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi hal itu jika merupakan bagian dari misi bersama. Dengan demikian, kesetaraan yang diinginkan oleh setiap orang akan hadir di dalamnya.

Peran yang diambil oleh GPIB Paulus Jakarta dalam menyikapi kemiskinan di tengah kota Jakarta khususnya Jakarta Pusat juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang dinyatakan oleh Rawls dalam tulisannya. Hal itu dapat terlihat dari pandangan serta sikap yang ingin diambil oleh GPIB Paulus Jakarta melalui jalan

menuju diakonia transformatif. Secara tegas, GPIB Paulus Jakarta ingin agar setiap orang yang dibantu dapat memperoleh haknya sendiri baik itu kebebasan hak milik terhadap kekayaan yang dimiliki oleh invidu, kebebasan politik terhadap hak untuk memilih serta dipilih dalam sebuah negara kebebasan, serta kebebasan dalam berpikir dan berkeyakinan. Hal ini telah dinyatakan dalam sebuah pernyataan terhadap keinginannya agar setiap orang dapat hidup secara mandiri melalui diakonia transformatif. Melalui peran yang diambil oleh GPIB Paulus Jakarta, secara implisit mereka telah menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai rumah Tuhan dan institusi sosial untuk menjadi perantara atau wadah bagi orang-orang yang terasingkan dan tidak dapat memperoleh haknya. Hal itu ditunjukkan secara jelas melalui berbagai program yang dijalankan, sehingga menunjukkan bahwa GPIB Paulus menjamin kebebasan yang dimiliki oleh individu yang mengalami keterpurukan. Dengan demikian, berbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu yang terangsingkan dapat diperoleh secara bebas melalui wadah GPIB Paulus Jakarta

GPIB Paulus Jakarta juga menyadari dengan seksama bahwa sesungguhnya ada bentuk ketidaksamaan diantara individu. Hal ini dapat dilihat secara jelas melalui bentuk program-program yang telah dirancang oleh GPIB Paulus Jakarta. Dalam hal tersebut, GPIB Paulus menyadari bahwa ada ketidaksamaan antara individu yang mampu secara materi dan individu yang tidak mampu. Melalui bentuk kesadaran tersebut, GPIB Paulus Jakarta mengambil sikap yang konkrit dengan mengajak para relawan yang mampu untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangan terhadap orang-orang yang kurang mampu dalam bentuk apapun. Bukan hanya itu saja, dana yang dialokasi untuk program yang ada di dalam komisi

Pelkes (Pelayanan Kesaksian) merupakan bentuk kesadaran bahwa GPIB Paulus menjamin hak-hak individu yang tidak dapat diperoleh secara langsung sehingga dapat diakses kepada setiap orang yang membutuhkan. Melalui hal tersebut, setiap orang dapat berdampingan satu sama lain sehingga tidak ada sekat maupun kelas yang membedakan antara orang yang kaya dan miskin. Hal ini memang perlu untuk dilakukan, karena perhatian yang mengutamakan orang tertindas kemiskinan tidak lagi menjadi formalitas, melainkan hal yang wajib untuk dilakukan oleh gereja.[34]

GPIB Paulus Jakarta juga menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang sama, hal tersebut selaras dengan pandangan Rawls terhadap *Original Position* yang memandang bahwa setiap orang itu setara. Melalui pandangan tersebut, secara eksplisit GPIB Paulus Jakarta telah menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika mereka memberikan bantuan terhadap orang yang mengalami keterasingan akibat kemiskinan yang terjadi, tidak ada sama sekali pandangan bahwa orang yang memberi lebih tinggi dari yang diberi. Hal ini dikarenakan, iman yang dimiliki oleh jemaat GPIB Paulus yang selalu ditanamkan secara teologi mengenai menghormati serta menghargai sesama manusia. Slogan tersebut dapat terlihat secara jelas pada motto yang dimiliki oleh GPIB dalam Injil Lukas 13 : 29 yang berbunyi "Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka duduk makan di dalam Kerajaan Allah." Dalam ayat tersebut, GPIB Paulus menyadari bahwa sesungguhnya setiap orang sama di hadapan Allah sehingga tidak ada sekat maupun kelas di dalamnya. Hal lain yang menjadi alasan dasar gereja berbuat demikian ialah dikarenakan gereja hadir untuk mewartakan kebaikan kepada setiap

[34] Benhard Kieser, *Mewartakan Dalam Kebebasan* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 143.

orang mengenai kasih Allah melalui tindakan serta perbuatan.[35] Dengan demikian, gereja dapat memberikan keharmonisan kepada setiap orang akan merasa setara terhadap satu sama lain.

SIMPULAN

. Kesmiskinan merupakan suatu penyakit dari masalah sosial yang harus diselesaikan bersama. Hal ini dilakukan, agar keadilan yang mengarah kepada kebebasan serta kesetaraan diantara setiap individu dapat tercapai. Seperti halnya teori John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan yang sesungguhnya harus melihat individu-individu yang terasingkan agar dapat disetarakan. Oleh karena itu, gereja secara khusus GPIB Paulus Jakarta sebagai rumah Tuhan serta institusi soial perlu memahami secara menyeluruh makna dari keadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan, GPIB Paulus Jakarta perlu menyadari bahwa sesungguhnya kemiskinan hadir menciptakan ketimpangan sosial, sehingga ada banyak orang yang perlu untuk ditolong. Dalam hal tersebut, GPIB Paulus Jakarta perlu memperhatikan secara pasti melalui tindakan yang harus dilakukan dalam menyikapi kemiskinan agar dapat menciptakan kesetaraan serta damai sejahtera bagi setiap orang yang mengalami keterasingan. Dengan demikian, makna keadilan yang dinyatakan oleh Rawls dapat terealisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bergereja.

DAFTAR PUSTAKA

Adirasetya, Joas. *Gereja Menuju Sebuah Visi Bersama*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia,

[35] Joas Adirasetya, *Gereja Menuju Sebuah Visi Bersama* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2019), 58.

2019.

Amani, Natasha Khairunnisa. "Indonesia Masuk Daftar 100 Negara Paling Miskin Di Dunia." Liputan6, 2022. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5084740/indonesia-masuk-daftar-100-negara-paling-miskin-di-dunia.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Azzahra, Tiara Aliya. "Jumlah Warga Miskin Ekstrem Di DKI Melonjak: 95.668 Jiwa Per Maret 2022." detik.com, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6541817/jumlah-warga-miskin-ekstrem-di-dki-melonjak-95668-jiwa-per-maret-2022.

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023." bps.go.id, 2023. https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html.

Belekubun, Rivaldo Arnold. "Kemiskinan Ekstrem Di Jakarta Naik Penanganan Mesti Efektif Dan Tepat Sasaran." Kompas.id, 2023. https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/04/upaya-mengikis-kemiskinan-ekstrem-di-jakarta?status=sukses_login&status_login=login.

CNN Indonesia. "RI Masuk 100 Negara Paling Miskin Di Dunia." cnnindonesia.com, 2022. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/ri-masuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia#:~:text=Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia.,%243.870 per kapita pada 2020.

Damayanti, Febrina, Thriwaty Arsal, and Adang Syamsudin Sulaha. "Kondisi Sosial

Ekonomi Pengemis Dalam Perspektif Teori Dramaturgi (Studi Kasus Di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)," 2017.

Djonet, Santoso. *Penduduk Miskin Transcient Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589.

Goudzwaard, Bob, and Harry de Lange. *Di Balik Kemiskinan & Kemakmuran*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Harefa, Oinike Natalia. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.

Itang. "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan." *Jurnal Keislaman: Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2015).

Kieser, Benhard. *Mewartakan Dalam Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Martin, Chen. *Teologi Gustavo Gutierrez*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

Nelfira, Winda. "Masih Ada Pemukiman Kumuh Dekat Istana, Ketua DPRD DKI Jakarta: Jaraknya 1 Km." Liputan6, 2023. https://www.liputan6.com/news/read/5237096/masih-ada-pemukiman-kumuh-dekat-istana-ketua-dprd-dki-jakarta-jaraknya-1-km.

Oentoro, Jimmy. *Gereja Impian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Pattiasina, Sharon Michelle O. "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 1 (2021): 125–40. https://doi.org/https://doi.org/10.34307/b.v4i1.238.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Sembiring, Jonathan Freshly. "Gereja Dan Diakonia." *Pondok Daud* 6, no. 1 (2020).

Siswanto, Krido. "Tinjauan Teoritis Dan Teologis Terhadap Diakonia Transformatif." *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2014).

Soleh, A Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2004): 175–92.

Sutrisna, Tria, and Ihsanuddin. "BPS DKI: Penduduk Miskin Jakarta 477.830 Orang." Kompas.com, 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/17/18105101/bps-dki-penduduk-miskin-jakarta-477830-orang.

Thee, Wie Kian. *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Umami, Ulfatul. "Cara Pandang Dan Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 9, no. 4 (2013): 343–54. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk.v9i4.6673.

Wairata, Meyvie. "Diakonia Transformatif Dalam Pengentasan Kemiskinan: Upaya Mentransformasi Pelayanan Gereja Terhadap Orang Miskin Dalam Konteks GKI Martin Luther Di Tanah Papua." Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW, 2017.